

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Pengendalian Internal memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah organisasi termasuk Pemerintah daerah. Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan Pengendalian Internal yang baik agar dapat memperoleh keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan. Pengendalian Internal di Indonesia masih sangat minim sekali,. Maraknya berita yang sering diungkapkan mengenai berbagai tindakan penyimpangan ataupun kecurangan yang terjadi di Indonesia menjadikan diperlukan adanya pengawasan atau pengendalian internal dalam menjalankan otonomi daerah guna mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan masih sangat sering terjadi didalam sebuah organisasi, dikarenakan adanya pengendalian internal yang kurang memadai dalam suatu organisasi. Kasus yang terjadi dalam perkembangan pengelolaan keuangan negara ini menuntut pemerintah untuk responsif dalam melakukan pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan untuk mencapai pengendalian internal yang memadai. Adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara Pasal 56 ayat (4) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sistem Pengendalian Internal yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Banyaknya pemerintah daerah di Indonesia dengan otonomi yang semakin besar, membuat pengawasan yang baik sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) dalam organisasi baik di sektor pemerintahan maupun swasta biasanya disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan KPMG *fraud survey 2006* ditemukan bahwa lemahnya pengendalian internal menjadi faktor utama terjadinya kecurangan yaitu sebesar 38% dari total kasus kecurangan yang terjadi. Dari faktor tersebut terlihat bahwa keberadaan dan pelaksanaan pengendalian internal sangat penting (Martani & Zaelani, 2011)

Menurut Nurwati & Trisnawati, (2015) menyatakan Kelemahan Pengendalian Internal merupakan kelemahan signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Tujuan Pengendalian Pemerintah Daerah adalah, Melindungi asset Negara baik asset fisik maupun asset data, Memelihara catatan dan dokumen secara terincidan akurat, Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan dan andal, Meningkatkan efisiensi dan efektifitas operasi organisassi, Menjamin ditaatinya kebijakan Manajemen dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Banyak faktor yang mempengaruhi turun naiknya Kelemahan Pengendalian Internal, diantaranya adalah Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal. Menurut Sukirno (2012, hlm. 9) Pertumbuhan Ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Ukuran Perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat menunjukkan besar kecilnya keadaan Pemerintah Daerah dan digunakan sebagai suatu alat ukur dimana dapat diklasifikasikan ukuran besar kecilnya suatu entitas Pemerintah Daerah (Saputro & Mahmud 2015). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang diperoleh dengan cara mengelola dan memanfaatkan potensi daerahnya dan dapat berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Kristanto 2009). Kompleksitas daerah merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya demi megimplementasikan Pengendalian Internal (Saputro & Mahmud, 2015). Menurut Mahmudi (2010, hlm. 87) Belanja Modal dalam konteks akuntansi bisnis bukan merupakan aktivitas yang mempengaruhi laporan laba rugi, tetapi mempengaruhi neraca, pada organisasi sektor publik biaya merupakan belanja tetapi tidak semua belanja merupakan biaya, karena Belanja Modal yang masih berupa *cost* dan belum menjadi *expense*.

Menurut teori yang dijelaskan sebelumnya, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal jika dikelola dengan baik akan meningkatkan serta berpengaruh terhadap

Kelemahan Pengendalian Internal (KPI) yang diukur dengan cara menemukan jumlah temuan kasus KPI.

Di Indonesia ada beberapa fenomena yang diambil dalam penelitian ini mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Terkait laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), adanya pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, pengelolaan aset, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal. Atas permasalahan yang terjadi pada beberapa pemerintah daerah dapat ditemukannya perbandingan antara besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi, ukuran Pemerintah (aset), pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal dengan kelemahan pengendalian internal pada beberapa Provinsi di Pemerintah Daerah yang berbeda dengan teori, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada tahun 2014 di beberapa Provinsi, sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan atas Fenomena Kelemahan Pengendalian Internal

No.	Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi	Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Kompleksitas Daerah	Belanja Modal	Kelemahan Pengendalian Internal
1.	Banten	5,47%	12,535 Triliun	4,899 Triliun	48 SKPD	691,484 Miliar	28 Temuan
2.	Jawa Timur	5,86%	25,914 Triliun	14,422 Triliun	74 SKPD	1,207 Triliun	7 Temuan

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) & Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah diolah.

Dapat dilihat dari tabel 1 di atas, dinyatakan pada tahun 2014, apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya terdapat fakta yang berbeda dengan teori. Provinsi Banten memiliki temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal sebesar 28 temuan kasus, dan provinsi Jawa Timur memiliki temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal sebesar 7 temuan kasus, namun pertumbuhan ekonomi, ukuran perusahaan (total aset), pendapatan asli daerah, dan belanja modal yang dimiliki Provinsi Banten terbilang lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur dan juga Provinsi Banten memiliki jumlah SKPD yang lebih sedikit dari Provinsi Jawa Timur. Pengendalian internal pada pemerintah daerah belum dapat dijalankan dengan efektif sehingga masih banyaknya penyimpangan yang terjadi

pada pertumbuhan ekonomi, ukuran perusahaan (aset), pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah dan belanja modal, maka terdapat fenomena pada perbandingan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur.

Untuk pertumbuhan ekonomi berdasarkan table di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 Provinsi Banten memiliki jumlah persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47% dengan adanya 28 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal. Sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 5,86% dengan 7 temuan kasus kelemahan pengendalian internal. Kondisi ini menyatakan bahwa terdapat lebih banyak temuan kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi pada Provinsi Banten, yang dimana memiliki persentase pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa timur. Namun, secara teori yang telah dinyatakan oleh Rachmawati dan Handayani (2016) bahwa pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat kelemahan pengendalian internalnya juga tinggi. Hal ini berbeda dengan teori yang telah dicantumkan sehingga dapat dikatakan tidak semua pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi mempunyai kelemahan pengendalian internal yang tinggi juga.

Ukuran pemerintah (total aset) juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal, dapat dilihat tabel di atas disimpulkan bahwa pada tahun 2014 Provinsi Banten memiliki total aset sebesar Rp.12,535 Triliun dengan adanya 28 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal. Sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki total aset sebesar Rp. 25,914 Triliun dengan 7 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal. Kondisi tersebut menyatakan bahwa terdapat lebih besarnya kelemahan pengendalian internal terjadi pada Provinsi Banten, dimana memiliki total aset yang lebih kecil daripada Provinsi Jawa Timur. Namun, secara teori yang telah dinyatakan oleh Kristanto (2009) bahwa ukuran pemerintahan yang besar akan memiliki lebih banyak kelemahan pengendalian internal. Hal ini berbeda dengan teori yang telah dicantumkan sehingga dapat dikatakan kelemahan pengendalian internal yang besar tidak selalu terjadi pada total aset yang aset yang lebih besar.

Menurut Martani & Zaelani (2011) menyatakan, Pemerintah Daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih banyak. Namun berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kasus dengan teori, yakni Provinsi Banten pada tahun 2014 memiliki total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4,899 Triliun dengan 28 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki total Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 14,442 Triliun dengan 7 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal. Dapat dinyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal yang besar tidak selalu terjadi pada pemerintah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih besar. Pada Provinsi Banten memiliki Pendapatan Asli Daerah yang lebih kecil namun temuan kasus pada kelemahan pengendalian internalnya lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan Pendapatan Asli Daerah yang kecil masih saja banyaknya penyimpangan yang terjadi.

Kompleksitas daerah juga menjadi salah satu faktor kelemahan pengendalian internal, karena semakin kompleks suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan dan memiliki area kerja yang tersebar akan semakin sulit pengendalian internal dijalankan. Artinya, semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka kelemahan pengendalian internal yang terjadi akan semakin kompleks (Fauza, 2015). Namun, berdasarkan table di atas disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kasus dengan teori, pada tahun 2014 Provinsi Banten memiliki 48 SKPD dengan 28 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal, sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki 74 SKPD dengan 7 temuan kasus kelemahan pengendalian internal. Dapat dinyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal yang besar tidak selalu terjadi pada pemerintah yang memiliki area kerja yang luas. Pada Provinsi Banten yang hanya mempunyai 48 SKPD dapat ditemukan kasus kelemahan pengendalian internal yang lebih besar dari pada Provinsi Jawa Timur yang mempunyai 74 SKPD. Sehingga didalam pemerintahan yang luas area kerjanya sedikit pun masih banyak penyimpangan yang terjadi.

Belanja modal pun menjadi salah satu faktor kelemahan pengendalian internal atas dasar berbagai kasus yang terjadi, hal ini menunjukkan bahwa belanja

modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Dikarenakan belanja modal yang tinggi belum tentu sistem pengendalian internalnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelwengkan belanja modal tersebut (Nurwati & Trisnawati, 2015). Sehingga dinyatakan bahwa anggaran yang lebih besar untuk belanja modal akan menyebabkan kesulitan penerapan pengendalian internal sesuai dengan prosedur yang benar, maka kelemahan pengendalian internal meningkat. Namun, berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kasus dengan teori, pada tahun 2014 Provinsi Banten memiliki jumlah belanja modal sebesar Rp. 691,484 Miliar dengan 28 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal, sedangkan pada tahun 2014 Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah belanja modal sebesar Rp. 1,207 Triliun dengan 7 temuan kasus pada kelemahan pengendalian internal. Dapat dinyatakan bahwa kelemahan pengendalian internal yang besar tidak selalu terjadi pada pemerintah daerah yang memiliki belanja modal yang lebih besar. Pada Provinsi Banten dengan jumlah belanja modal yang lebih kecil memiliki kelemahan pengendalian internal yang lebih besar daripada Provinsi Jawa Timur. Sehingga dengan belanja modal yang kecil masih saja ada banyaknya penyimpangan yang terjadi.

Fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa semakin besar atau kecilnya pertumbuhan ekonomi, aset, pendapatan, kompleksitas dan belanja modal pemerintah daerah dapat mempengaruhi besar atau kecilnya kelemahan pengendalian internal pada pemerintah daerah. Pada fenomena tersebut terdapat perbedaan dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang tidak konsisten.

Berapa penelitian terdahulu telah meneliti mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal. Namun, terdapat hasil yang tidak konsisten dalam pengujian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal yaitu variabel Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh namun ada juga yang menunjukkan hasil yang berpengaruh.

Berdasarkan penelitian dari Martani & Zaelani (2011) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian

Internal. Artinya, jika nilai rata-rata pertumbuhan rendah maka memiliki rata-rata Kelemahan Pengendalian Internal yang rendah, maka begitu pula sebaliknya. Adapun penelitian menurut Nurwati & Trisnawati (2015) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, menunjukkan bahwa semakin besar atau kecilnya Pertumbuhan Ekonomi maka tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal, karena Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi belum menjamin Pengendalian Internalnya lebih baik dari Pemerintah Daerah yang memiliki Pertumbuhan Ekonomi yang lebih rendah. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu Fauza (2015), Yeni, dkk (2015), Putri & Mahmud (2015), dan Petrovits *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Berdasarkan penelitian Putri & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, semakin besar Ukuran Pemerintah maka dapat mengurangi Kelemahan Pengendalian Interanal. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu menurut Martani & Zaelani (2011), Kristanto (2009), yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Nurwati & Trisnawati (2015) menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Daerah Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, besar kecilnya total asset Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu Fauza (2015), Yeni, dkk (2015), Saputro & Mahmud (2015), Boyle *et al.* (2004), dan Petrovits *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Ukuran Pemerintah Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Berdasarkan penelitian Martani & Zaelani menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, jika terdapat kenaikan porsi Pengendalian Internal (PAD) dalam model penelitian, maka akan menyebabkan kenaikan Kelemahan

Pengendalian Internal. Selain itu penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Saputro & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, kenaikan dan penurunan PAD tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus Kelemahan Pengendalian Internal (KPI). Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu, Putri & Mahmud (2015), Fauza (2015), Nurwati & Trisnawati (2015), dan Yeni, dkk (2015) yang menyatakan bahwa PAD Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Menurut Fauza (2015) menyatakan bahwa Kompleksitas Daerah memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, semakin banyak segmen atau cabang organisasi maka Pengendalian Internal yang terjadi akan semakin kompleks. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu, Martani & Zaelani (2011), yang menyatakan bahwa Kompleksitas Daerah memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Saputro & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Kompleksitas Daerah Tidak memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, kenaikan dan penurunan Kompleksitas tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus Kelemahan Pengendalian Internal. Selain itu beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung yaitu, Putri & Mahmud (2015), Yeni, dkk (2015), dan Petrovits *et al.* (2009) yang menyatakan bahwa Kompleksitas Daerah Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

Lalu berdasarkan penelitian dari Nurwati & Trisnawati (2015) menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, bahwa Belanja Modal ini bisa menjadi obyek korupsi politik dan administratif oleh pihak legislative dan eksekutif. Dikarenakan Belanja Modal yang tinggi belum tentu sistem Pengendalian Internalnya semakin baik, dengan demikian mendorong pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyelwenangkan Belanja Modal tersebut. Slain itu penelitian sebelumnya



yang mendukung yaitu, Kristanto (2009) yang menyatakan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Adapun menurut Saputro & Mahmud (2015) menyatakan bahwa Belanja Modal Tidak memiliki pengaruh yang Signifikan terhadap Kelemahan Pengendalian Internal. Artinya, kenaikan dan penurunan Belanja Modal tidak akan mempengaruhi terjadinya kasus KPI.

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diketahui bahwa dari perbedaan peneliti sekarang dengan penelitian terlebih dahulu (justifikasi/karakter penelitian), peneliti sebelumnya yaitu Rachmawati & Handayani (2015) menggunakan 5 variabel yaitu, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal. Dengan 38 sampel pemerintah daerah kabupaem/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013 dengan metode analisis regresi berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal dengan sampel seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi se-Indonesia tahun 2014 sampai 2016 dengan menerapkan metode regresi linier berganda.

Masih terdapat hasil yang belum konsisten dalam penelitian tentang Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal diantaranya Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah, dan Belanja Modal. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih perlunya penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh antar variabel tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal”.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- b. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?

- c. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- d. Apakah Kompleksitas Daerah berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?
- e. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kelemahan Pengendalian Internal?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- d. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompleksitas Daerah terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.
- e. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Bedasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, diharapkan dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, antara lain:

- a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya, menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh, serta diharapkan dapat digunakan bagi pengembangan ilmu yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi, khususnya mengenai Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh, Pertumbuhan Ekonomi, Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kompleksitas Daerah dan Belanja Modal terhadap Kelemahan Pengendalian Internal yang pengukurannya didasarkan pada atribut berbasis akuntansi pemerintah dan laporan realisasi berdasarkan anggaran dalam APBD.

2) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran kepada pemerintah daerah akan pentingnya Pengendalian Internal. Dapat memberikan masukan dan informasi terhadap peningkatan Pengendalian Internal di lingkup pemerintah daerah serta mampu memaksimalkan potensi yang ada di daerah guna meningkatkan kemajuan daerah. Manfaat praktis lainnya dapat memberikan informasi terkait dengan topik penelitian ini kepada pihak yang membutuhkannya.

3) Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke daerah-daerah yang berpotensi sehingga pendapatan daerah dapat bertambah

